

**DAMPAK BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)  
BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA KARANGREJEK  
KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Oleh :

**Dantika Ovi Era Tama dan Yanuardi, M.Si**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) bagi kesejahteraan masyarakat di Desa Karangrejek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul khususnya di bidang ekonomi, kesehatan dan pembangunan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian dilaksanakan selama satu bulan di Desa Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan subyek penelitian yaitu Kepala Desa, Pengelola BUMDES, dan beberapa masyarakat Desa Karangrejek pengguna layanan BUMDES. Instrumen penelitian ini adalah diri peneliti sendiri. Guna menjamin validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yaitu analisis dengan menggunakan reduksi data, *display data*, dan verifikasi dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDES Karangrejek telah berhasil memberi dampak yang positif bagi peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat meskipun unit-unit dari BUMDES belum berjalan secara keseluruhan. BUMDES Karangrejek juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat desa yang lebih terjamin. Pembangunan desa pun semakin lancar dengan adanya dana yang dihasilkan dari BUMDES. Selain itu adanya tingkat partisipasi masyarakat yang begitu tinggi membuat BUMDES Karangrejek semakin maju.

**Kata kunci : Dampak, BUMDes, Kesejahteraan Masyarakat**

## **I. PENDAHULUAN**

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Tujuannya, adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional.

Kemajuan ekonomi nasional hanya akan tercapai jika terdapat iklim perekonomian yang baik di tingkat provinsi. Kemajuan ekonomi di tingkat provinsi akan tercapai jika kabupaten memiliki kegiatan ekonomi yang baik. Kemajuan ekonomi sebuah kabupaten dapat tercapai karena adanya sumbang sih dari ekonomi pedesaan yang kuat yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini akan menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk diterapkan di semua tingkat pembangunan dan keputusan berdasarkan kebutuhan nyata dari masyarakat. Pembangunan pedesaan merupakan salah satu cara dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa.

BUMDES lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDES sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDES adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDES akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Desa Karangrejek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul merupakan desa yang sudah mempunyai BUMDES dan telah berjalan selama lima tahun. Desa Karangrejek tampil sebagai pemenang kedua Lomba Desa tingkat Nasional Tahun 2012. Pengumuman pemenang lomba desa tingkat nasional itu dilakukan Sekjen Depdagri RI Diah Anggraeni yang mewakili Menteri Dalam Negeri RI Gamawan Fauzi di Jakarta, medio Agustus 2012 lalu. Menurut Sugeng Bagyo, tampilnya Desa Karangrejek sebagai pemenang kedua dalam lomba desa tingkat nasional itu berkat dukungan semua warga, termasuk bantuan Pemerintah

Pusat, Pemprov DIY dan Pemkab Gunungkidul. Seluruh kebutuhan dana bagi pengembangan Desa Karangrejek diperoleh dari keuntungan badan usaha milik desa (BUMDES) Karangrejek. Pada tahun 2011 keuntungan BUMDES mencapai Rp. 184 juta. Angka ini menyumbang hampir sepertiga dari pendapatan asli desa. Melihat keberhasilan dari BUMDES Desa Karangrejek ini menjadikan Desa Karangrejek sebagai desa yang sering dikunjungi oleh desa lain bahkan desa dari luar Jawa untuk belajar mengenai BUMDES.

BUMDES Desa Karangrejek mempunyai unit-unit usaha di dalamnya Salah satu diantaranya adalah dengan adanya BUMDES Tirta Kencana yang bergerak di bidang pengelolaan air bersih. Kini dengan hadirnya BUMDES warga Karangrejek sudah tidak kesulitan lagi dalam memenuhi kebutuhan akan air bersih untuk keperluan sehari-hari. BUMDES Desa Karangrejek selain dalam bidang PAB (Pengelolaan Air Bersih), juga bergerak bidang kredit mikro atau simpan pinjam yaitu Usaha Kredit Mikro (UKM), Jasa Pengelolaan Usaha Desa (JPUD), dan masih banyak unit-unit usaha yang ada di dalamnya namun belum semua berjalan dengan efektif. Pemerintah desa berharap dengan hadirnya BUMDES ini dengan unit-unit usaha yang ada di dalamnya dapat membantu warga dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui pembangunan-pembangunan ekonomi desa secara utuh, karena Desa Karangrejek dinilai BPP Kemendagri sampai Bulan Februari tahun 2013 sekitar 17, 3% atau 881 warga masih dicap miskin oleh pemerintah. (<http://bpp.kemendagri.go.id/index.php?action=content&id=2013022013085391>). Selain itu semakin majunya BUMDES dikhawatirkan menimbulkan perilaku bisnis bagi pengelolanya yang hanya mengejar keuntungan semata dan melupakan tujuan utama dari BUMDES sendiri yaitu mensejahterakan masyarakatnya.

BUMDES Karangrejek secara resmi berdiri pada tahun 2008 dengan sejarah pendirian yang panjang. Pendirian BUMDES Karangrejek diprakarsai oleh masyarakat desa Karangrejek bekerja sama dengan

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya BUMDES Karangrejek ini berkembang dengan pesat dan mampu untuk memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Berangkat dari titik tolak tersebut penulis merasa perlu untuk mengangkat isu ini sebagai sebuah tema dalam skripsi yang berjudul Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul. Disamping itu adalah adanya kesadaran tentang pentingnya desa sebagai pilar perekonomian bangsa yang harus dimiliki oleh mahasiswa ilmu administrasi negara sebelum terjun ke dunia nyata, mendorong peneliti untuk meneliti BUMDES.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) bagi kesejahteraan masyarakat di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul.

## **II. KAJIAN TEORI**

### **1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Visi pembangunan yang mengutamakan manusia sangat relevan karena adanya pergeseran peranan pemerintah dalam konteks pembangunan, yang pada hakekatnya dilaksanakan oleh masyarakat. Sejak perencanaan hingga implementasi dan pemanfaatannya, peranan masyarakat yang menonjol. Peran itu lebih efektif apabila masyarakat juga berperan dalam penggunaan alokasi anggaran. Korten (1988:242-245) mengemukakan bahwa pembangunan itu sendiri haruslah merupakan suatu proses belajar, yaitu maksudnya peningkatan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif yang tidak hanya menyesuaikan diri pada perubahan, melainkan juga untuk mengarahkan perubahan itu sehingga sesuai dengan tujuannya sendiri.

Midgley (1995:78-79) mengemukakan ada beberapa aspek dalam pembangunan desa, diantaranya mementingkan proses dan adanya

intervensi. Dua hal tersebut perlu disoroti karena terkait dengan konsep pemberdayaan. Suatu program pembangunan yang hanya mementingkan hasilnya untuk dipersembahkan pada masyarakat justru mengingkari martabat masyarakat, karena hal tersebut menghambat masyarakat untuk berperan serta dalam proses. Sedangkan intervensi dimaksudkan bahwa dalam pencapaian perubahan sosial dengan pemerataan kesejahteraan bagi semua penduduk tidak terlepas dari campur tangan pemerintah, karena pemerintah yang menguasai berbagai sumber daya (*Strategies for Social Development by Governments*).

Hakekat pemberdayaan masyarakat adalah upaya dan proses yang dilakukan supaya masyarakat memiliki keleluasaan dalam menentukan pilihan-pilihan dalam hidupnya yang lebih khas dan lokal itu. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan desa. Mereka dapat menggerakkan segala potensi yang dimilikinya untuk dapat turut mewarnai hasil pembangunan yang diharapkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Namun yang terpenting adalah bagaimana mengakomodir domain sosial, ekonomi, kultural dalam proses pemberdayaan masyarakat, disamping domain politik.

## **2. Kelembagaan dan Peran Kelembagaan**

Menurut Mubyarto (1989), yang dimaksud lembaga adalah organisasi atau kaedah-kaedah baik formal maupun informal yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam kegiatan-kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu.

Peran kelembagaan sangat penting dalam mengatur sumberdaya dan distribusi manfaat, untuk itu unsur kelembagaan perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan potensi desa guna menunjang pembangunan desa. Dengan adanya kelembagaan petani dan ekonomi desa sangat terbantu dalam hal mengatur silang hubungan antar pemilik input dalam menghasilkan output ekonomi desa dan dalam mengatur distribusi dari output tersebut.

### **3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)**

Pengertian BUMDES atau Badan Usaha Milik Desa menurut Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDES adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Hal tersebut berarti pembentukan BUMDES didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pembentukan BUMDES adalah atas prakarsa masyarakat desa.

BUMDES didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa. Artinya usaha yang kelak akan diwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan di dalam masyarakat desa.

### **4. Kesejahteraan Masyarakat**

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat 1, Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar bisa hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Upaya untuk mewujudkan suatu kesejahteraan sosial, meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial.

Tujuan dari kesejahteraan berdasarkan UU Nomor 11 Pasal 3 Tahun 2009, adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.
- 2) Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
- 3) Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
- 4) Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
- 5) Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

#### **5. Dampak Kebijakan Publik**

Dampak kebijakan adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata (Dye, 1981). Menurut sebagian pakar (Dye, 1981 ; Anderson, 1984), terdapat sejumlah dampak kebijakan yang perlu diperhatikan di dalam evaluasi kebijakan, yakni :

- a. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok target.
- b. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok lain selain situasi atau kelompok target
- c. Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan keadaan di masa yang akan datang yang akan berpengaruh pada kelompok sasaran maupun di luar sasaran.
- d. Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain, yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik sehingga kebijakan tersebut dapat terlaksana sedemikian rupa.
- e. Biaya tidak langsung kebijakan , yang mencakup kehilangan peluang melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Biaya tersebut sering tidak diperhitungkan dalam melakukan evaluasi kebijakan



publik karena sebagian tidak dapat dikuantifikasi.

Dalam studi evaluasi, menurut Finsterbusch dan Motz (dalam Samudro dkk, 1994) terdapat 4 (empat) jenis evaluasi yaitu:

- 1) *Single program after only*, merupakan jenis evaluasi yang melakukan pengukuran kondisi atau penilaian terhadap program setelah meneliti setiap variabel yang dijadikan kriteria program. Sehingga analis tidak mengetahui baik atau buruk respon kelompok sasaran terhadap program.
- 2) *Single program befora-after*, merupakan penyempurnaan dari jenis pertama yaitu adanya data tentang sasaran program pada waktu sebelum dan setelah program berlangsung.
- 3) *Comparative after only*, merupakan penyempurnaan evaluasi kedua tapi tidak untuk yang pertama dan analis hanya melihat sisi keadaan sasaran bukan sasarannya.
- 4) *Comparative before-after*, merupakan kombinasi ketiga desain sehingga informasi yang diperoleh adalah efek program terhadap kelompok sasaran.

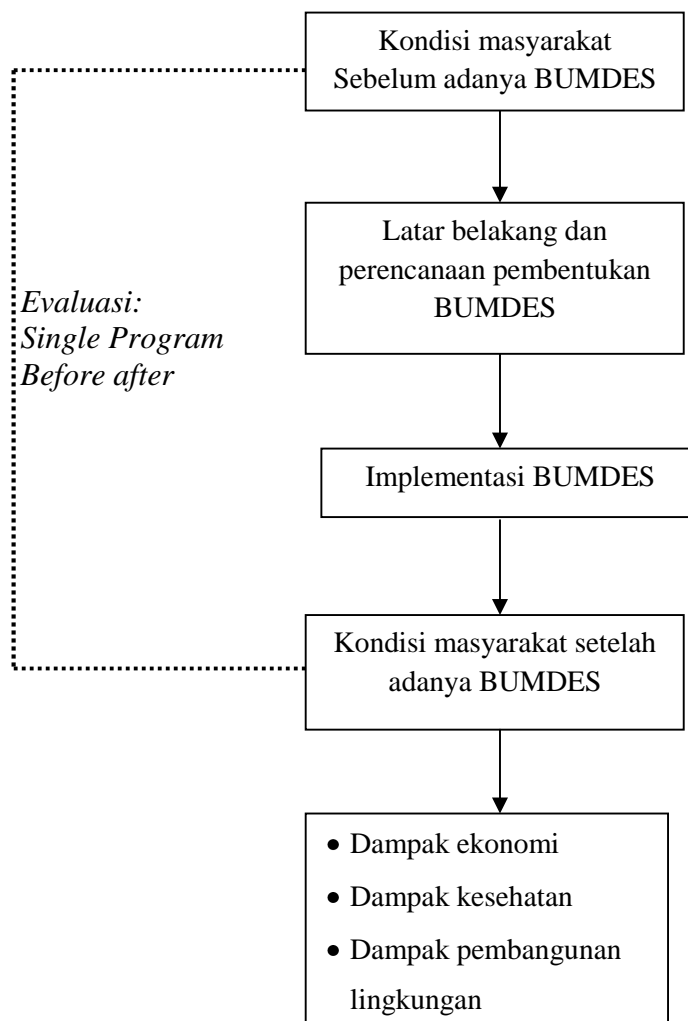
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis evaluasi *single program before-after*. Informasi yang diperoleh dari jenis evaluasi ini adalah keadaan kelompok sasaran sebelum dan setelah program dilaksanakan, efektivitas program dalam kelompok sasaran tertentu, dan dampak dari implementasi suatu kebijakan.

## **6. Penelitian Yang Relevan**

- a. Hasil penelitian skripsi yang ditulis Angger Sekar Manikam pada tahun 2010 yang berjudul Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa Di Desa Ngeposari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2009. Dipublikasikan sebagai Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UMY.
- b. Hasil penelitian skripsi yang ditulis Abdul Qodir pada tahun 2011 yang berjudul Analisis Kelembagaan dalam Upaya Pembangunan

Kesejahteraan Masyarakat ( Studi Kasus Peranan Koperasi Jasa Keuangan Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Kotamadya). Dipublikasikan sebagai tesis jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Kekhususan Pembangunan Sosial FISIPOL UI.

## 7. Kerangka Pemikiran



## 8. Pertanyaan Peneliti

- a. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya BUMDES di Desa Karangrejek?
- b. Apa keunggulan BUMDES Karangrejek dari BUMDES lainnya?

- c. Bagaimana dampak dari segi ekonomi masyarakat setelah adanya BUMDES?
- d. Bagaimana dampak dari segi kesehatan masyarakat setelah adanya BUMDES?
- e. Bagaimana pembangunan lingkungan bagi masyarakat di Desa Karangrejek setelah adanya BUMDES?

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **1. Desain Penelitian**

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif dalam hal ini adalah untuk mengidentifikasi lingkungan internal dan eksternal Desa Karangrejek sehingga dapat menemukan dampak adanya kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) bagi masyarakat desa.

#### **2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul. Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan 10 Juli 2013.

#### **3. Informan Penelitian**

Penetapan informan dalam penelitian ini berdasarkan anggapan bahwa informan dapat memberikan informasi yang diinginkan penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Kepala Desa Karangrejek, Bapak Kasdi Siswo Pranoto
- b. Ketua BUMDES Desa Karangrejek, Bapak Siya Pujono
- c. Ketua unit usaha BUMDES PAB Tirta Kencana, Bapak Suprpto
- d. Ketua unit usaha BUMDES UKM, Ibu Suwarni
- e. Masyarakat Desa Karangrejek pengguna layanan BUMDES sebanyak 15 orang.

#### **4. Data dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu;

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung di lapangan ketika penelitian dilakukan. Data ini dikumpulkan secara langsung di lapangan melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi terhadap Kepala Desa Karangrejek, Ketua BUMDES, Ketua unit-unit usaha BUMDES, pengurus BUMDES dan masyarakat pengguna BUMDES.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari data sekunder berupa laporan pertanggungjawaban BUMDES, profil BUMDES, data penduduk Desa Karangrejek yang meliputi data tingkat kesejahteraan, tingkat pengangguran, dll serta data-data lain yang terkait dengan BUMDES yang peneliti peroleh dari media publik.

## **5. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian ini, yang bertindak sebagai instrumen utama dalam penelitian adalah diri peneliti sendiri. Dalam proses penelitian, peneliti menggunakan alat bantu pengumpulan data yaitu berupa buku catatan, handphone untuk merekam pembicaraan dengan informan, pedoman wawancara maupun perangkat observasi selama proses penelitian berlangsung.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

a. Wawancara

Wawancara dilakukan menggunakan pendekatan wawancara semi terstruktur dengan menggunakan petunjuk umum atau panduan wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan pengurus BUMDES Karangrejek, petugas pemerintahan Desa Karangrejek, dan masyarakat Desa Karangrejek. Pemilihan subjek wawancara ini dengan mempertimbangkan pengetahuan subjek tentang informasi yang akan ditanyakan.

b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumen internal yang digunakan antara lain struktur Profil Desa Karangrejek, data tingkat kesejahteraan

penduduk, data tingkat pengangguran, profil BUMDES, serta laporan pertanggungjawaban BUMDES. Sedangkan dokumen eksternal yang digunakan antara lain koran-koran lokal seperti Kedaulatan Rakyat, Kompas, TribunJogja, dll. Selain itu juga peneliti melakukan pencarian (*searching*) berita-berita yang berkaitan dengan dampak BUMDES bagi kesejahteraan masyarakat desa.

c. Observasi

Kegiatan pengamatan terhadap obyek penelitian ini untuk memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Observasi dalam penelitian ini adalah pengamatan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pengurus BUMDES dan pemerintah desa.

## 7. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, teknik pemeriksaan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek belik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat pertanyaan yang berbeda.

## 8. Teknik Analisis Data

Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis data sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, serta mengumpulkan data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil wawancara dengan informan penelitian dan dokumen di lapangan yang berkaitan dengan dampak kebijakan BUMDES bagi Kesejahteraan masyarakat di Desa Karangrejek.

b. Reduksi Data

Dalam penelitian ini peneliti mereduksi dan memilah data hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Karena data yang diperoleh dari lapangan masih kompleks dan bersifat mentah. Maka

peneliti hanya akan memilih data yang benar-benar relevan berkaitan dengan dampak BUMDES bagi kesejahteraan masyarakat di Desa Karangrejek.

c. Display Data

Data disajikan dalam bentuk teks naratif untuk menjelaskan proses yang terjadi dari tahap perencanaan pembangunan BUMDES hingga tahap implementasi serta dampak yang ditimbulkan bagi kesejahteraan masyarakat Desa Karangrejek. Dari data yang telah disajikan tersebut kemudian diolah berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya untuk memperoleh gambaran secara jelas. Keseluruhan data yang telah diolah peneliti tersebut kemudian dikumpulkan menjadi satu oleh peneliti untuk kemudian disajikan hingga mencapai tahap kesimpulan

d. Verifikasi dan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan diarahkan kepada hal-hal yang umum untuk mengetahui jawaban dari permasalahan. Permasalahan penelitian ini berkaitan dengan dampak BUMDES bagi kesejahteraan masyarakat di Desa Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Hasil Penelitian**

Sejak pertama kalinya BUMDES disahkan pada tahun 2008 sudah banyak konsumen yang menggunakan layanan tersebut, dan sampai sekarang jumlah konsumen terus meningkat. Meningkatnya jumlah konsumen otomatis akan menambah pendapatan bagi BUMDES sehingga laba setiap tahunnya meningkat.

Dalam hal partisipasi masyarakat, pemerintah desa berusaha melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan di desanya. Keterlibatan masyarakat ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengelolaan dan evaluasi. Pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan dilakukan dengan melibatkan *stakeholder* dalam masyarakat. Kepala dusun dan tokoh masyarakat

memegang peran penting untuk mendistribusikan ide, gagasan, manfaat pembangunan ini kepada warga sehingga muncul komitmen seluruh warga untuk terlibat dalam gotong royong pembangunan sarana dan prasarananya. Partisipasi masyarakat saat pelaksanaan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana air bersih dilakukan dengan bergotong royong di lingkungan RT mereka. Bentuk partisipasi masyarakat setelah air mengalir adalah dengan turut serta menjadi konsumen PAB TK.

Evaluasi dampak dalam penelitian ini menggunakan jenis studi evaluasi yang dikemukakan oleh Finsterbusch dan Motz (dalam Wibawa, 1994: 74) yaitu menggunakan *single program before after*. Dimana evaluator hanya menggunakan kelompok eksperimen yaitu kelompok yang dikenai kebijakan untuk memperoleh data dari evaluasi dampak kebijakan ini. Dalam menggunakan jenis evaluasi *single program before after* ini untuk memperoleh data mengenai keadaan masyarakat sebelum dan setelah adanya BUMDES

Kondisi masyarakat Desa Karangrejek sebelum diterapkannya BUMDES jauh dari sejahtera, kemiskinan masih sangat terlihat. Dengan angka kemiskinan yang tinggi yaitu mencapai 68,8% pada tahun 1993 sehingga menjadikan Desa Karangrejek ditetapkan sebagai desa IDT. Dari tahun ke tahun masalah kemiskinan belum bisa dipecahkan juga, walaupun tingkat kemiskinan menurun tetapi belum semua masyarakat merasakan kesejahteraan. Setelah adanya kebijakan BUMDES dan diterapkan di Desa Karangrejek, kondisi masyarakat mulai ada perubahan. pengembangan BUMDES di pedesaan telah membuka peluang usaha bagi masyarakat. Misalnya industri rumah tangga (*home industry*) seperti tahu, tempe, toge, dan usaha perikanan yang sangat meningkat. pada tahun 2011 sampai tahun 2012 sebanyak lebih dari 800 pekerja kini terdapat pada *home industry*. Dengan demikian pengangguran di Desa Karangrejek jauh berkurang, dan ekonomi meningkat. Tingkat kesejahteraan dari tahun 2008 sampai 2011 mengalami peningkatan.

Melalui BUMDES dengan unit usaha PAB TK, masyarakat yang sebelum adanya BUMDES mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih sehingga menyebabkan gangguan pada kesehatan mereka, sekarang kebutuhan air telah tercukupi bahkan melimpah. Tidak ada lagi masyarakat yang rela berjalan kaki jauh untuk mendapatkan air. Pada musim kemarau panjang pun, masyarakat tetap masih bisa mendapatkan air. Air tetap mengalir di rumah mereka. Kebutuhan untuk minum, memasak, mandi pun sudah tercukupi. Hewan ternak pun tidak lagi mengalami gizi buruk akibat kekurangan air dan langkanya rumput.

Secara tidak langsung, masyarakat akan merasakan dampak dari pembangunan lingkungan pemukiman di pedesaan yang berasal dari dana BUMDES yang 20% dari keuntungannya dialokasikan kepada pendapatan desa. Melalui dana inilah sarana dan prasarana di pedesaan bisa dibangun, seperti pembangunan pengaspalan jalan desa, drainase, pagar pekarangan, gapura pintu masuk, gardu ronda, sanitasi, pembangunan jaringan air bersih, pembangunan balai padukuhan dan balai desa.

## **2. Pembahasan**

BUMDES merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pembentukan BUMDES didasarkan pada kebutuhan, potensi dan kapasitas desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pembentukan BUMDES adalah atas prakarsa masyarakat desa dan terdapat intervensi dari pemerintah desa. Pemerintah pusat hanya mendanai pembentukan BUMDES dan melakukan pengawasan. Keterlibatan pemerintah desa sebagai pendiri BUMDES bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun dari luar desa). Pemerintah desa harus ikut berperan pada pembentukan BUMDES sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundang-undangan yang



berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

BUMDES juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dikuasai oleh kelompok tertentu di tingkat desa. Artinya, tata aturan yang terwujud adalah mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan mengarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota. Dengan adanya BUMDES diharapkan mampu meningkatkan pembangunan yang berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang nantinya akan menjadi kesejahteraan nasional.

Desa Karangrejek merupakan salah satu desa yang sudah memiliki BUMDES sejak tahun 2008. Perencanaan dan pembentukan BUMDES Karangrejek ini adalah atas prakarsa dari seluruh masyarakat karena melihat kondisi yang dialami mereka yaitu keterpurukan akibat kekeringan air yang melanda desa mereka. Pendirian BUMDES ini mendapatkan dana dari pemerintah kabupaten setelah mengajukan proposal. Kemudian dana tersebut dikelola seluruhnya oleh masyarakat desa dan terdapat intervensi dari pemerintah desa. Seperti yang dikemukakan oleh Midgley (1995:78-79) yaitu “Ada beberapa aspek dalam pembangunan desa, diantaranya mementingkan proses dan adanya intervensi dari pemerintah.” Intervensi yang dimaksud disini adalah adanya perlindungan hukum yang mengatur tentang BUMDES dan pengawasan dari pemerintah desa Karangrejek terhadap kegiatan-kegiatan BUMDES di Karangrejek. Meskipun seluruhnya dikelola oleh masyarakat, namun keterlibatan pemerintah desa juga diperlukan dalam pengelolaan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat desa. Pemerintah desa juga ikut andil dalam melihat potensi desa untuk dikembangkan masyarakat sehingga menjadi unit-unit BUMDES Karangrejek.

Korten (1988:242-245) mengemukakan bahwa “Pembangunan itu haruslah merupakan suatu proses belajar, yaitu maksudnya peningkatan

kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif yang tidak hanya menyesuaikan diri pada perubahan, melainkan juga untuk mengarahkan perubahan itu sehingga sesuai dengan tujuannya sendiri.” Pada Pembangunan desa melalui BUMDES ini tidak hanya mementingkan hasil yang akan dicapai melainkan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya juga. Masyarakat bisa belajar dan melatih ketrampilan mereka dalam pengelolaan BUMDES yaitu dengan mengajak masyarakat dalam mendirikan BUMDES serta menempatkan mereka pada kepengurusan BUMDES. Selain itu masyarakat harus bisa mengolah dan memanfaatkan BUMDES yang ada. Sebagai proses pembelajaran, masyarakat desa sampai saat ini mampu menciptakan usaha-usaha baru dan mempunyai pendapatan lebih sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Uphoff dalam Cernea (1988:500) menyatakan bahwa “Salah satu paradoks dalam mendorong partisipasi adalah bahwa dalam mempromosikan pembangunan dari bawah (*bottom up planning*), justru sering pula membutuhkan upaya dari atas.” Hal ini terlihat dalam wacana yang menggunakan pendukung atau promotor yang direkrut, dilatih dan ditempatkan di lapangan dari pusat untuk bekerja dengan penduduk pedesaan dan mengembangkan kapasitas organisasi diantara mereka. Dalam awal mula pendirian BUMDES Karangrejek, dilakukan pelatihan dan pendidikan terlebih dahulu kepada masyarakat desa yang didatangkan dari pemerintah kabupaten serta mengambil mahasiswa dari suatu perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat desa lebih terlatih dan menguasai tentang BUMDES. Dengan memberdayakan seluruh lapisan masyarakat Desa Karangrejek, pembangunan sumur bor yang menjadi salah satu unit BUMDES ini berjalan dengan lancar. Seluruh masyarakat membuatnya secara gotongroyong tanpa dibayar, hal ini membuktikan bahwa partisipasi masyarakat akan pembangunan BUMDES sangat tinggi.

Kemudian Sumodiningrat (1997:165) menyatakan, bahwa pemberdayaan Masyarakat bertalian erat dengan upaya penanggulangan masalah-masalah pembangunan, seperti pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan. Upaya memberdayakan masyarakat tersebut harus dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

- 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.

Pemberdayaan masyarakat Desa Karangrejek dilakukan dengan cara pemberian motivasi, pendidikan dan pelatihan serta membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki agar dapat berkembang dan berkontribusi terhadap pembangunan desa sehingga berdampak pada kesejahteraan hidupnya.

- 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering).

Di desa Karangrejek seringkali mengundang ahli dari luar untuk memberikan pelatihan, hal tersebut dilakukan secara rutin untuk meningkatkan potensi masyarakat dalam memanfaatkan BUMDES dan mengembangkannya sehingga dapat tercipta banyak peluang usaha bagi masyarakat.

- 3) Memberdayakan juga berarti melindungi.

Di dalam masyarakat Desa Karangrejek banyak terdapat perbedaan, tidak semua masyarakat memiliki *skill* yang sama. Oleh karena itu perlu adanya intervensi dari pemerintah desa untuk melindungi masyarakat yang lemah agar tidak bertambah lemah yaitu dengan cara terus memberi pengertian mengenai BUMDES agar masyarakat yang tidak tau menjadi tau dan ikut berpartisipasi dalam pemanfaatan BUMDES.

Setelah diterapkannya BUMDES di Desa Karangrejek dan melihat partisipasi masyarakat yang begitu tinggi, banyak dampak yang diberikan kepada desa dan masyarakat desa. Pembangunan di desa semakin meningkat. BUMDES di Desa Karangrejek ini dinilai sudah berhasil

dijalankan meskipun belum semua unit berjalan efektif. Keberhasilan ini tentunya tidak luput dari kerja keras dan partisipasi seluruh masyarakat desa. Dengan memanfaatkan BUMDES, kondisi masyarakat yang dulunya miskin sekarang kehidupannya lebih terjamin, kesejahteraan masyarakat meningkat, pengangguran berkurang, kesehatan lebih baik dan banyak pembangunan yang dilakukan yang berorientasi masyarakat. Pemerintah desa dalam menciptakan unit-unit BUMDES ini sangat melihat kebutuhan masyarakat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Angger Sekar Manikam (2010) dalam skripsi Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa Di Desa Ngeposari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2009 yang menghasilkan bahwa “BUMDES di desa tersebut dinilai gagal dan belum berjalan dengan baik. Kenyataan tersebut dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat desa yang masih rendah serta program-program badan usaha milik desa yang belum berjalan secara keseluruhan serta belum dapat mengakomodir kepentingan masyarakat,` potensi desa serta kebutuhan petani sebagaimana tujuan utama pendirian BUMDES tersebut.” Di Desa Karangrejek prtisipasi masyarakat begitu tinggi, pembangunan dilakukan secara gotongroyong, desa memiliki potensi yang dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat dengan melihat kondisi masyarakat lalu menanggulangnya dengan membangun suatu sumber air bersih yang memberi dampak bagi kehidupan masyarakat Desa Karangrejek.

Suatu kebijakan akan menimbulkan suatu dampak. Dampak kebijakan public merupakan sebuah studi evaluasi terhadap suatu kebijakan pemerintah yang sudah diimplementasikan kepada sasaran kebijakan. Untuk mengetahui dampak perlu adanya evaluasi. Evaluasi dampak dalam penelitian ini menggunakan jenis studi evaluasi yang dikemukakan oleh Finsterbusch dan Motz (dalam Wibawa, 1994: 74) yaitu menggunakan *single program before after*. Dimana evaluator hanya menggunakan kelompok eksperimen yaitu kelompok yang dikenai

kebijakan untuk memperoleh data dari evaluasi dampak kebijakan ini. Kelompok yang dikenai kebijakan disini adalah masyarakat desa Karangrejek. Dalam menggunakan jenis evaluasi *single program before after* ini untuk memperoleh data mengenai keadaan masyarakat sebelum dan setelah adanya BUMDES.

BUMDES Karangrejek menimbulkan dampak positif di bidang ekonomi, kesehatan, dan pembangunan lingkungan bagi masyarakat desa. Dampak yang paling terlihat adalah di bidang ekonomi karena BUMDES merupakan lembaga yang dibangun berdasarkan tujuannya yaitu memajukan ekonomi di pedesaan. Berikut tabel perkembangan hasil pembangunan dan dampak yang ditimbulkan dari sebelum dan setelah adanya BUMDES

Tabel 5. Perkembangan Hasil Pembangunan Desa Karangrejek

No.	Sasaran/Objek	Tingkat Perkembangan		Keterangan
		Kondisi Awal	Kondisi Saat Ini	
1.	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	1993 ditetapkan sebagai IDT dengan angka kemiskinan 68,6%	Angka kemiskinan turun menjadi 16,34% pada akhir 2012	Berkembangnya UEM (Usaha Ekonomi Masyarakat) dan BUMDES
2.	Sarpras Balai Desa	1997 tidak memadai, hanya tersedia 1 rumah limasan dengan luas 96m <sup>2</sup> . PADES < 8Juta	Tersedia ruang kerja dan ruang pertemuan dengan luas 1018m <sup>2</sup> . PADES > 200juta	Hasil pengelolaan aset desa dan adanya BUMDES
3.	Penyediaan Air Bersih	2007 ketersediaan air bersih sangat terbatas	Seluruh masyarakat telah tercukupi air bersih	Kesehatan Masyarakat terjamin
4.	Sektor Pertanian	1994 tergantung adanya curah hujan, 1 tahun hanya 1 sampai	Dengan pemanfaatan air bawah tanah (PAB), bisa 3 kali	Musim tanam 3 tanaman holtikultura

		2 kali tanam	tanam dalam 1 tahun	
5.	Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM)	2008 terbatas pada sektor pertanian	Industri rumah tangga meningkat sangat pesat	Ditunjang BUMDES dan IT
6.	Pengelolaan administrasi dan sistem informasi	2009 bersifat biasa dan manual	Sistem aplikasi/komputer dan IT	Penyediaan IT ditunjang dari BUMDES

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kegiatan ekonomi semakin berkembang dengan pesat. Tidak hanya itu, tetapi di bidang kesehatan dan pembangunan juga terjadi perubahan yang semakin baik. Terciptanya pelaku usaha baru membuktikan berkembangnya Usaha Ekonomi Masyarakat di Desa Karangrejek, hal ini memberikan arti bahwa kegiatan BUMDES di pedesaan menciptakan *multiplier effect*, dimana tercipta banyaknya lapangan pekerjaan dan peluang dalam berusaha. Suatu peluang usaha akan menjadi sumber pendapatan yang memberikan tambahan penghasilan kepada masyarakat jika mampu menangkap peluang usaha yang potensial dikembangkan menjadi suatu kegiatan usaha yang nyata. Dengan demikian kemampuan masyarakat memanfaatkan peluang yang ada akan dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam menangkap peluang itu sendiri. Kemudian kemampuan masyarakat dalam mengorganisir sumberdaya yang dimiliki sedemikian rupa sangat penting sehingga peluang yang potensial menjadi usaha yang secara aktual dapat dioperasikan.

Aktivitas BUMDES yang melibatkan banyak tenaga kerja diperkirakan secara positif merangsang, menumbuhkan dan menciptakan lapangan kerja serta lapangan berusaha. Melalui kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan selama proses kegiatan unit-unit BUMDES mempunyai keterkaitan ke belakang (*backward linkages*). Pada proses kegiatan ini akan muncul antara lain jasa buruh tani, jasa angkutan, perdagangan pangan dan sandang, perdagangan

peralatan kerja serta bahan dan material yang dibutuhkan selama proses tersebut.

Aktivitas BUMDES memberikan pengaruh eksternal yang bersifat positif atau bermanfaat bagi masyarakat. Manfaat kegiatan ini terhadap aspek ekonomi pedesaan, antara lain:

- 1) Memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha
- 2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat
- 3) Memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Beberapa kegiatan yang secara langsung memberikan dampak terhadap komponen ekonomi pedesaan dan budaya masyarakat sekitar, antara lain:

- 1) Kegiatan pembangunan sumberdaya masyarakat desa
- 2) Pembangunan sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, terutama sarana jalan darat
- 3) Penyerapan tenaga kerja lokal
- 4) Penyuluhan dan pelatihan mengenai pertanian, kesehatan dan pengelolaan BUMDES

Kegiatan perusahaan membutuhkan tenaga kerja dan tenaga teknis penyambungan saluran air dalam pengelolaannya di PAB TK. Secara ideal tenaga kerja direkrut dari masyarakat pedesaan yang diberi pelatihan. Pengelolaan di BUMDES sendiri menyerap tenaga kerja cukup banyak, di samping itu kegiatannya bersifat manual sehingga tenaga kerja manusia sangat diperlukan. Adanya aktivitas kegiatan pembangunan BUMDES khususnya pengadaan sarana prasarana menyebabkan aktivitas dan mobilitas masyarakat semakin tinggi. Hal itu berpengaruh terhadap peningkatan kesempatan berusaha terutama dalam bidang jasa dan perdagangan. Kegiatan pembangunan jaringan jalan juga meningkatkan mobilitas masyarakat, membantu masyarakat dalam pemasaran hasil pertaniannya. Di samping itu kebutuhan hidup masyarakat di pedesaan dapat dipenuhi dari hasil pertanian masyarakat itu sendiri. Pengadaan kebutuhan perusahaan dapat bekerjasama dengan masyarakat setempat, itu

merupakan dampak positif kebijakan BUMDES terhadap peningkatan kesempatan berusaha bagi masyarakat sekitar.

Selain banyaknya dampak positif bagi perekonomian di pedesaan, BUMDES juga telah banyak berdampak pada kesehatan masyarakat yang lebih baik juga berpengaruh positif terhadap pembangunan pemukiman berbasis masyarakat. Dengan demikian pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Karangrejek meningkat dengan adanya kebijakan mengenai BUMDES.

Apabila keberhasilan BUMDES Karangrejek dalam mensejahterakan masyarakatnya ini dapat diikuti oleh seluruh desa yang ada di Indonesia maka kemajuan ekonomi nasional akan tercapai, karena kemajuan ekonomi nasional hanya akan tercapai jika terdapat iklim perekonomian yang baik di tingkat provinsi. Kemajuan ekonomi di tingkat provinsi akan tercapai jika kabupaten memiliki kegiatan ekonomi yang baik. Kemajuan ekonomi sebuah kabupaten dapat tercapai karena adanya sumbang sih dari ekonomi pedesaan yang kuat.

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat sudah terlihat meskipun belum maksimal karena dari ketujuh BUMDES yang ada hanya tiga yang sudah berjalan dengan hasil yang mendekati harapan. Dan keempat BUMDES yang lain pemerintahan desa Karangrejek terus mengembangkan untuk mengoptimalkan keberadaanya dengan cara melihat peluang pasar dan kebutuhan yang ada.

## **V. KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

- a. BUMDES Karangrejek telah berhasil memberi dampak yang positif bagi peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat. BUMDES Karangrejek juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat desa yang lebih terjamin. Pembangunan desa pun semakin lancar dengan adanya dana yang dihasilkan dari BUMDES.



- b. BUMDES Karangrejek belum maksimal dalam menjalankan unit-unit usahanya. Dari ketujuh unit BUMDES yang ada baru tiga yang telah berjalan efektif. Hal tersebut disebabkan karena sumber daya manusia yang belum mahir dalam mengolah unit-unit tersebut. Tetapi adanya tingkat partisipasi masyarakat yang begitu tinggi terhadap kegiatan BUMDES yang sudah berjalan membuat BUMDES Karangrejek dapat berjalan dengan lancar.

## **2. Implikasi**

BUMDES di Desa Karangrejek secara umum dikatakan telah berhasil dan berjalan dengan lancar karena berdampak positif bagi masyarakat desa. Implikasi penelitian ini berkaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terutama dalam mengembangkan kemampuan berusaha, peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan. Temuan penelitian juga mampu menumbuhkan dan memupuk jiwa kewirausahaan bagi masyarakat desa serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap sebuah kebijakan.

## **3. Saran**

- a. Bagi pemerintah desa dan pengelola BUMDES supaya segera lebih efektif dalam menjalankan unit-unit usaha lain dari BUMDES dengan member pelatihan kepada masyarakat agar tujuan dari BUMDES lebih maksimal sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat yang merata.
- b. Bagi pemerintah pusat supaya terus menjalankan kebijakan BUMDES ini, kemudian member pengawasan serta pelatihan bagi desa-desa dan tetap mengacu pada kesejahteraan masyarakat desa. Karena kebijakan seperti inilah yang lebih efektif diterapkan di tingkat desa, suatu lembaga usaha ekonomi yang berbadan hukum yang dikelola seluruhnya oleh masyarakat desa dan hasilnya untuk masyarakat itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Sudarman. 1992. *Teori Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE.
- Bryant, Coralie dan Louise G. White. 1987. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Jakarta: LP3ES
- Cernea, Michael. 1988. *Mengutamakan Manusia Di Dalam Pembangunan: Variabel-Variabel Sosiologi Di Dalam Pembangunan Pedesaan*. Jakarta: UI
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi UNIBRAW. 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*. Jakarta: Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP RPDN)
- Dunn, William. 1998. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ginandjar Kartasasmita. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo
- Harry Hikmat. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press
- Hayami, Y dan Kikuchi, M. 1987. *Dilema Ekonomi Desa, Suatu Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan Kelembagaan Di Asia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Koirudin. 2005. *Sketsa Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia*. Malang: Averroes Press.
- Korten, David C dan Sjahrir. 1988. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Moeljarto Tjokrowinoto. 1987. *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep Arah Dan Strategi*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto. 1989. *Pengantar Ekonomi Pertanian: Lembaga Pendidikan Dan Penerangan Ekonomi Dan Sosial*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Muslimin Nasution. 2002. *Pengembangan Kelembagaan Koperasi Pedesaan Untuk Agroindustri*. Bogor: IPB Press
- Samodra Wibawa, dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Schumacher, E.F. 1993. *Kecil Itu Indah: Ilmu Ekonomi Yang Mementingkan Rakyat Kecil*. Jakarta: LP3ES

Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Surya Dharma dan Pinondang Simanjuntak. 2000. *Paradigma Birokrasi Pemerintah dan Otonomi Daerah*. Jurnal Bisnis dan Birokrasi

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Teori dan Konsep Kebijakan Publik” dalam Kebijakan Publik yang Membumi, konsep, strategi dan kasus*, Yogyakarta : Lukman Offset dan YPAPI

Titik Sumarti, dkk. 2008. *Model Pemberdayaan Petani Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Dan Sejahtera*. Bogor: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IPB.

Tjahya Sumodiningrat. 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta: Rineka Cipta

Tri Kunawaningsih Pracoyo & Antyo Pracoyo. 2006. *Aspek Dasar Ekonomi Mikro*. Jakarta: PT Grasindo.

Tumpal P. Saragi. 2004. *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa Alternatif Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: IRE Press

<http://www.ditpam-pu.org/berita-166-andalkan-spamdes-karang-rejek-menangi-lomba-desa-tingkat-nasional.html>. diakses pada tanggal 2 April 2013 Pukul 21. 20 WIB

<http://www.harianjogja.com/baca/2011/05/03/desa-karangrejek-menuju-desa-sumber-air-bersih-146243>. diakses pada tanggal 2 April 2013 Pukul 21.18 WIB

<http://karangrejek.net/?p=596> . Diakses pada tanggal 2 April 2013 Pukul 21.15 WIB

### **Skripsi:**

Abdul Qodir. 2011. *Analisis Kelembagaan dalam Upaya Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat ( Studi Kasus Peranan Koperasi Jasa Keuangan Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Kotamadya)*. Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Kekhususan Pembangunan Sosial FISIPOL UI

Angger Sekar Manikam. 2010. *Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa Di Desa Ngeposari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2009*. Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UMY

### **Tesis:**

Lasito. 2002. *Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*.  
Tesis. Jakarta: FISIP UI

**Peraturan-Peraturan:**

UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Perda No 7 tahun 2010 tentang tata cara pendirian BUMDes di seluruh desa di  
kabupaten gunungkidul

Perdes No 6 tahun 2010 tentang pendirian bumdes